BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki tingkat penduduk relatif tinggi, hal ini menimbulkan beberapa masalah bagi Indonesia terutama mengenai kemiskinan. Kemiskinan ialah masalah yang dihadapi diberbagi negara tidak hanya di Indonesia saja. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak dengan hasil yang signifikan, tingkat kemiskinan di Indonesia per maret 2025 kembali menurun menjadi 8,25% dari semula 8,47%.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun ditengah tekanan harga komoditas dunia, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestic dan daya beli masyarakat (BPS Indonesia 2025) .

Program bantuan pangan (Banpang) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyrakat penerima manfaat. Dalam implementasinya, efektivitas program menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran,tepat waktu,dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di tingkat desa, tidak jarang ditemukan berbagaipermasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas program

tersebut. Hal ini juga terjadi di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa program bantuan pangan belum sepenuhnya optimal. Salah satu fenomena adalah masih adanya ketidaktepat sasaran penerima bantuan, dimana terdapat masyarakat yang seharusnya tidak termasuk kategori miskin tetapi tetap menerima bantuan. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang layak menerima namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria, tetap menginginkan untuk menerima bantuan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

Fenomena-fenomena lainnya adalah terkait dengan ketepatan waktu penyaluran bantuan yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga mengurangi manfaat bantuan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Selain itu, kualitas dan jumlah bantuan yang diterima juga menjadi perhatian, karena tidak selalu sesuai dengan harapan atau kebutuhan penerima manfaat. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Program Bantuan Pangan di Desa Kusambi Hulu masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) untuk mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuan yang diharapkan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program bantuan pangan di Desa Kusambi Hulu.

Ada beberapa kajian mengenai program bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 tahun 20I9 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial disebutkan bahwa bantuan sosial tersebut adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan resiko sosial. Berdasarkan peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2017 bahwa program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpada program penanganan fakir miskin yang kemudian diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH.

Berdasarkan rapat internal Presiden RI pada tanggal 2 maret 2023 mengenai kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras dan surat Kepala Badan Nasional Nomor: 82/TS.03.03/K/3/2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan . Tujuan dari bantuan pangan ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan dan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak dari inflasi dan fluktuasi harga (Badan Pangan Nasional 2023).

Menyikapi naiknya harga beras saat ini yang sekarang sudah mencapai harga Rp. 14000 sampai 15000/kg, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos. Harapannya dengan

adanya bantuan tersebut dapat menekan harga beras dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai. Dimana Menteri Sosial Republik Indonesia menimbang:

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan pangan sosial secara non tunai dan akuntabel.
2. Bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri sosial Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan yaitu saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan stabilitas harga. Pada saat darurat pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyalurkan beras CBP demi menjaga ketahanan pangan rumah tangga bagi korban bencana sebanyak 200 ton setahun, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 ton setahun. Jumlah tersebut tidak harus dihabiskan, namun dengan kewenangan tersebut Gubernur. Bupati/Walikota mempunyai stok beras yang cukup untuk membantu korban bencana pada detik pertama.

Pada saat terjadi bencana Gubernur dan Bupati/Walikota dapat langsung memerintahkan BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan. Pengalaman selama ini, beras tersebut Sebagian dikirim ke beberapa dapur umum untuk langsung di distribusikan sebagai makanan yang siap makan dan Sebagian dibagikan langsung ke beberapa rumah atau kelompok untuk dipergunakan dilain waktu.

Situasi darurat berlalu, umumnya ada nacaman baru yaitu kerawanan pangan pasca bencana karena belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca bencana, untuk itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih bisa dipergunakan untuk mengatasi rawan pangan pasca bencana tersebut. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme pada saat darurat, pada saat sistuasi ini Bupati/Walikota dapat menyampaikan jumlah kebutuhan beras untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga korban bencana kepada Menteri sosial, dengan instruksi tersebut BOLUG menyalurkan beras sejumlah permintaan yang dibutuhkan untuk lokasi yang memerlukan.

Cadangan Beras Pemerintah yang sudah digunakan saat ini adalah sebagai alat intervensi pemerintah pada saat harga drastic mengalami kenaikan, pada saat ini pemerintah mengintervensi pasar dengan menambah suplai ke pasar dengan memperhatikan perkembangan harga beras di pasar, Bupati/Walikota mengajukan permohonan OP (operasi pasar) tingkat provinsi dan akan diteruskan kepada Menteri perdagangan. Dengan dasar surat permohonan tersebut, Menteri Perdagangan memerintahkan perum BOLUG untuk melaksanakan operasi pasar di lokasi yang telah ditetapkan dan dengan harga yang ditentukan serta pada periode yang dibutuhkan dengan berkoordinasi pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang

memerlukan agar tidak terjadi keresahan masyarakat akibat dari kenaikan harga yang drastis.

Berkaitan dengan penjelasan diatas dan menganai adanya program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional pada Keluarga Penerima Manfaat tersebut, maka banyak pemerintah dan wilayah di indoensia yang mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk beras atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut, salah satunya adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan lebih khususnya pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang juga mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk beras. Tim Pendata harus memastikan bahwa kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas tersebut terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Total Beras atau pangan yang diterima pada program BPNT berupa CBP ini yaitu 10kg/KPM.

Dari hasil observasi awal penelitian dengan adanya bantuan sosial terutama Program Bantuan Pangan di Desa Kusambi Hulu Kecamtan Lampihong Kabupaten Balangan. Desa Kusambi Hulu memiliki 4 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 4,96 Km, memiliki jumlah penduduk sebanyak 622 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 212. Dan 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dimana melihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, namun banyak keluhan dari masyarakat Desa Kusambi Hulu “masih tidak terdapat waktu penyaluran bantuan beras masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu yang pasti dari pihak

terkait, terkadang bisa terjadi satu bulan sekali, dua bulan sekali, bahkan enam bulan sekali. Masih ada masyarakat di Desa Kusambi Hulu yang merupakan golongan miskin yang tidak masuk di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) padahal DTSEN merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional untuk mengatasinya Dinas Sosial Kabupaten Balangan telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial di bidang Badan Pangan Nasional masyarakat miskin yang belum masuk DTSEN untuk dapat dimasukkan DTSEN namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diterima oleh Kementerian Sosial Badan Pangan Nasional. Berdasarkan dari coordinator Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Adanya ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan terlihat dari beras yang didistribusikan ke desa telah dilengkapi dengan daftar penerima manfaat, namun masih terdapat nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, bahkan beberapa di antaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan Sebagian masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetap menginginkan untuk memperoleh bantuan tersebut. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan. Kualitas beras yang diterima oleh KPM terkadang tidak sesuai harapan terkadang dalam kondisi kurang baik berwarna kusam, berbau apek,

serta banyak butiran patah dan kotoran sehingga mengurangi kelayakan konsumsi. Kurangnya transparansi dan informasi, seperti tidak adanya sosialisasi yang jelas mengenai kriteria penerima, jadwal penyaluran, maupun mekanisme pengaduan, sehingga menimbulkan kebingungan dan persepsi negative di masyarakat

Sehingga dengan adanya keluhan tersebut secara garis besar penulis dapat menemukan 5 (Lima) fenomena permasalahan terkait dengan Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut pada keluarga penerima manfaat di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong yaitu sebagai berikut :

1. Masih tidak terdapat waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu yang pasti dari pihak terkait, terkadang bisa terjadi 1 Bulan Sekali, 2 Bulan Sekali bahkan 6 Bulan Sekali. Ada 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dimana mereka menunggu pembagian beras tersebut. (Sumber Data : *Surat Keterangan dari Kepala Desa, 2026*)
2. Masih ada masyarakat di Desa Kusambi Hulu yang merupakan golongan miskin yang tidak masuk di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) padahal DTSEN merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional untuk mengatasinya Dinas Sosial Kabupaten Balangan telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial di

bidang Badan Pangan Nasional masyarakat miskin yang belum masuk DTSEN untuk dapat dimasukkan DTSEN namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diterima oleh Kementerian Sosial Badan Pangan Nasional. Berdasarkan dari coordinator Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. (Sumber Data : *DTSEN*)

3. Adanya ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan terlihat dari beras yang didistribusikan ke desa telah dilengkapi dengan daftar penerima manfaat, namun masih terdapat nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, bahkan beberapa di antaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan Sebagian masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetap menginginkan untuk memperoleh bantuan tersebut. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan. (Sumber Data : *DTSEN dan Data Penerima*)
4. Kualitas beras yang diterima oleh KPM terkadang tidak sesuai harapan terkadang dalam kondisi kurang baik berwarna kusam, berbau apek, serta banyak butiran patah dan kotoran sehingga mengurangi kelayakan konsumsi. (Sumber Data : *Foto dan Dokumen*)
5. Kurangnya transparansi dan informasi, seperti tidak adanya sosialisasi yang jelas mengenai kriteria penerima, jadwal penyaluran, maupun mekanisme pengaduan, sehingga menimbulkan kebingungan dan

persepsi negative di masyarakat. (Sumber Data : *Surat Keterangan dari Kepala Desa, 2026*)

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indicator keberhasilan dapat dicapai semaksimal mungkin. Dari uraian diatas terkait penyaluran bantuan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Kusambi Hulu belum berjalan dengan baik. Mengenai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan dalam proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian "**Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan"**.

B. Fokus Penelitian

Adapun Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan". maka penulis membuat fokus penelitian agar permasalahan tidak mengembang menggunakan teori menurut Sedarmayanti (2019:59) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Pencapaian tujuan
2. Ketepatan Waktu
3. Kualitas hasil (output)
4. Kepuasaan penerima manfaat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
   b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai "Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan".

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintahan Desa Kusambi Hulu dalam upaya meningkatkan mutunya dalam memberikan masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang program bantuan pangan untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksaan penyaluran program bantuan pangan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI